

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Sekalipun telah dilaksanakan 3 kali pemilu demokratis secara berkala di Afghanistan, yaitu pada 2004, 2009 dan 2014, hal tersebut bukan jaminan konsolidasi demokrasi mampu tercapai. Sebab untuk mewujudkan hal itu, tidak hanya dinilai pada proses jalannya pemilu, terdapat kriteria lain yang harus dimiliki suatu negara sehingga demokrasi mampu dikatakan stabil. Seperti apa yang diungkapkan oleh Larry Diamond bahwa terdapat 7 indikator menuju demokrasi terkonsolidasi.

Apabila dilihat dari unsur partai politik, hal tersebut belum terwujud. Kondisi partai politik di Afghanistan telah kehilangan daya tariknya. Masyarakat Afghanistan memandang partai politik selalu identik dengan pemerintahan komunis di masa lalu dan terdapat kekhawatiran bagi mereka bahwa partai politik merupakan organisasi yang memiliki kemungkinan memecah belah suatu etnis. Meskipun saat ini perkembangan partai politik di Afghanistan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Afghanistan masih membutuhkan aksi politik yang mampu mengesampingkan antara kepentingan politik dan etnis.

Namun di sisi lain, demokrasi di Afghanistan memiliki citra yang positif. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat Afghanistan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, meskipun dibayang-bayangi oleh teror kelompok Taliban yang akan mengancam kebebasan mereka. Situasi tersebut

menunjukkan keyakinan masyarakat Afghanistan terhadap penyelenggaraan demokrasi di negara mereka. Dalam konteks ini demokrasi mampu terlaksana, mengingat esensi dari konsolidasi demokrasi adalah legitimasi.

Terpilihnya Mohammad Ashraf Ghani pada September 2014 diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi Afghanistan. Harapan dan keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tekad yang pernah diucapkan oleh Mohammad Ashraf Ghani saat beliau dilantik sebagai presiden. Harapannya ini kemudian diimplementasikan ke dalam kebijakan-kebijakannya selama menjabat.

Dalam hal penanganan korupsi, Mohammad Ashraf Ghani menunjukkan hasil yang positif melalui penerapan kebijakan anti-korupsi yang diimplementasikan melalui beberapa upaya, seperti; aksi vokalnya dalam *reform paper* pada konferensi London, pembentukan dewan pengawas eksternal yaitu Komisi Pengadaan Nasional (*National Procurement Commission*) dan Otoritas Pengadaan Nasional (*National Procurement Authority*), membangun lembaga anti-korupsi yakni *High Council Governance, Rule of Law and Anti-Corruption* (HCAC), serta membentuk lembaga peradilan anti-korupsi yaitu *Anti-Corruption Criminal Justice Center* (ACJC).

Namun, upaya Ashraf Ghani tersebut strategi memiliki beberapa kelemahan dalam pengimplementasiannya. Di antaranya: lemahnya komitmen, konsistensi dan transparansi penegakan hukum, pemahaman yang keliru terhadap lembaga anti-korupsi yang independen, institusi yang masih lemah, serta kinerja institusi yang masih sulit dipahami. Di sisi lain, hal tersebut menjadi bukti kerja keras dan tekad

Mohammad Ashraf Ghani beserta *National Unity Government* dalam menurunkan angka pertumbuhan korupsi di Afghanistan.

Sedangkan menyangkut persamaan hak-hak perempuan, Mohammad Ashraf Ghani berupaya untuk membangun sebuah pemerintahan yang baik dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat Afghanistan, khususnya kaum perempuan. Melalui kebijakan-kebijakan seperti peningkatan partisipasi perempuan di pemerintahan dan mengajak perempuan Afghanistan untuk bergabung dalam komunitas Solidaritas Nasional, Mohammad Ashraf Ghani terbilang cukup berhasil.

Selanjutnya dalam hal keamanan, Ashraf Ghani dinilai gagal dalam menyempurnakan sendi-sendi demokrasi. Upaya yang dilakukan oleh Mohammad Ashraf Ghani dalam memberantas Taliban di Afghanistan dengan cara menggunakan kekuatan militer ataupun mengeksekusi 6 militan Taliban karena kejahatan teror, merepresentasikan cara-cara otoritarianisme yang masih kental. Kendati demikian, Mohammad Ashraf Ghani sebelumnya telah melakukan upaya yang persuasif dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme di Afghanistan.

Meskipun dalam pengimplementasiannya Mohammad Ashraf Ghani tidak mampu menjangkau secara keseluruhan, harus diakui bahwa setiap kebijakan yang diterapkan pasti memiliki kelemahan, dan setidaknya Ashraf Ghani sudah memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang ia telah janjikan. Dalam hal ini, Afghanistan masih patut belajar untuk membangun dan mendesain struktur institusi yang lebih efektif, transparan, *responsiveness* dan *accountable*,

meningkatkan rasa aman dan partisipasi masyarakat, serta membangun kerangka hukum yang adil dan tanpa pandang bulu guna untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan materi demokrasi, agar mengangkat tema kajian demokrasi di Afghanistan, sebab penulis memahami keterbatasan pada tema tersebut. Selanjutnya bagi yang telah meneliti tema yang sama dengan penulis, disarankan untuk menambah *Islamic Republic of Afghanistan Constitution* sebagai salah satu referensi agar mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga mudah dalam proses menganalisa

